

PENGARUH ANGGARAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI INDONESIA

Oleh:

*Ani Interdiana Candra Sari*¹
*Zakiah Fithah A'ini*²
*Martinus Tukiran*³

^{1,2}Universitas Indraprasta PGRI, Indonesia

³Universitas Pakuan Bogor, Indonesia

Email:

aniinterdianacs@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi indeks pembangunan manusia pada 34 Provinsi yang ada di Indonesia dengan variabel anggaran pendidikan dan kesehatan sebagai variabel bebas. Penelitian ini menggunakan data panel dengan *time series* berupa data *cross section* dari seluruh provinsi di Indonesia selama 5 tahun mulai dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Populasi penelitian ini adalah seluruh wilayah provinsi yang berada di Indonesia. Teknik sampling yang digunakan adalah sampel jenuh dengan mengambil keseluruhan populasi penelitian dijadikan sampel penelitian. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan uji korelasi antar variabel dan model regresi linier ganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan anggaran Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan anggaran kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan terdapat pengaruh bersama anggaran Pendidikan dan anggaran kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Kontribusi anggaran Pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia sebesar 19,5%. Untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia di masa yang akan datang dibutuhkan peran pemerintah yang lebih besar.

Kata Kunci: Anggaran Pendidikan, Kesehatan, Indeks Pembangunan Manusia

A. PENDAHULUAN

Indonesia berada di urutan ke-4 di dunia dan urutan pertama diantara negara-negara ASEAN didasarkan pada jumlah penduduk (Halim et al., 2022). Jumlah penduduk yang besar akan memberikan dampak positif dan negatif bagi pembangunan manusia. Jumlah populasi yang besar merupakan suatu hal yang positif, karena jumlah populasi yang besar tersebut dapat dijadikan sebagai subjek pembangunan. Sumber Daya Manusia atau SDM merupakan faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan pada suatu Negara. Namun disisi lain, jumlah populasi yang besar menjadi beban bagi pembangunan (apabila penduduknya tidak berkualitas). Memiliki jumlah populasi yang besar, tentu merupakan suatu

tantangan tersendiri untuk pemerintah dalam melakukan berbagai kebijakan. Salah satu kebijakan yang bisa di dilakukan dengan meningkatkan Indeks Manusia (IPM) melalui pengeluaran pemerintah. IPM merupakan data strategis sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) (BPS, 2022). Pembangunan manusia adalah salah satu indikator majunya suatu negara. Negara dikatakan maju tidak hanya dilihat dari nilai pendapatan domestik brutonya saja, namun juga melihat aspek harapan hidup masyarakat, pendidikan masyarakat dan juga standarisasi hidup layak yang memang dicerminkan lewat angka indeks tersebut (*Human Centered Development*). Jika standarisasi kehidupan yang layak sudah didapatkan oleh masyarakat, maka akan meningkatkan produktifitas masyarakat yang akan tercerminkan lewat pendapatan domestik bruto. Secara rinci, standarisasi kehidupan yang layak menurut IPM dibagi menjadi 3 dimensi yaitu: 1. Dimensi umur panjang dan hidup sehat (kesehatan) 2. Dimensi pengetahuan dan rata-rata lama sekolah penduduk (pendidikan) 3. Dimensi standar hidup layak (*purchasing power parity*) (perumahan dan fasilitas umum) (BPS, 2022). Upaya yang dilakukan Negara Indonesia dalam meningkatkan nilai IPM, yaitu dengan menggunakan instrument kebijakan fiskal, dalam artian pengeluaran pemerintah dikaitkan dengan dimensi-dimensi 1. Pengeluaran pemerintah dalam sektor kesehatan 2. Pengeluaran pemerintah dalam sektor pendidikan. Menurut (BPS, 2022), bagi Indonesia, IPM adalah data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan dana.

Pendidikan dan kesehatan memainkan peran utama dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang demi tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan (Diba et al., 2018). UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 171 bahwa alokasi anggaran di bidang kesehatan adalah mutlak terpenuhi (*Mandatory Spending*), bahwa pemerintah mengalokasikan anggarannya sekurang-kurangnya 5 persen dari APBN dan 10 persen dari APBN (Ardiningrum et al., 2021).

Dalam banyak penelitian sebelumnya, dana pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembentukan IPM di berbagai lokasi dan waktu penelitian. Walaupun demikian, terdapat juga penelitian dengan hasil temuan dimana anggaran pendidikan ternyata berpengaruh negatif terhadap pembentukan IPM. (Jean Sanny Mongan, 2019).

Atas dasar kondisi tersebut diataslah kiranya peneliti merasa perlu membuktikan apakah benar anggaran pendidikan dan kesehatan dapat mempengaruhi secara parsial maupun simultan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia khususnya pada tahun 2015-2019 dengan mempertimbangkan dampaknya belanja pemerintah daerah di bidang pendidikan dan kesehatan dalam pembentukan IPM di Indonesia

Bukti empiris hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi bagi pemerintah baik pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan pengalokasian anggaran belanja bidang pendidikan dan bidang kesehatan yang memberikan dampak positif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. KAJIAN PUSTAKA

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia adalah salah satu indikator kemajuan suatu negara. Suatu negara dapat dikatakan maju bukan hanya dihitung dari Produk Domestik Bruto (PDB) saja, tetapi mencakup beberapa aspek yaitu aspek kesehatan dan pendidikan warga negaranya. Pada hakekatnya, manusialah yang akan berperan aktif dalam aktivitas kegiatan mengumpulkan modal, mengeksploitasi sumber daya alam dan melaksanakan pembangunan nasional. Pada tahun 1990 *United Nations Development Programme* (UNDP) dalam laporannya "*Global Human Development Report*" memperkenalkan konsep pembangunan manusia sebagai paradigma baru dalam model pembangunan. Data UNDP (1990) (Mongan, 2019) menyatakan bahwa pembangunan manusia dirumuskan sebagai perluasan pilihan bagi penduduk, yang dapat dilihat sebagai proses upaya ke arah perluasan pilihan dan sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut. Pada saat yang sama, pembangunan manusia dapat dilihat juga sebagai pembangunan kemampuan manusia melalui perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan, dan keterampilan sekaligus sebagai pemanfaatan kemampuan atau keterampilan yang dimiliki. Konsep pembangunan tersebut lebih luas pengertiannya apabila dibandingkan dengan konsep pembangunan ekonomi yang menekankan pada pertumbuhan, kebutuhan dasar, kesejahteraan masyarakat, atau pengembangan sumber daya manusia. Dari definisi UNDP tersebut mencerminkan bahwa manusia dalam suatu wilayah selayaknya memiliki dan diberikan pilihan-pilihan yang luas dan dibutuhkan dukungan dari pemerintah guna memberikan sarana bagi masyarakat untuk dapat memanfaatkan dan mengambil keputusan sesuai dengan pilihan yang diambilnya. Dalam hal ini pemerintah merupakan fasilitator bagi masyarakat untuk mendapatkan pilihan-pilihan yang lebih luas. Gambaran yang dapat diambil guna melihat seberapa jauh peran pemerintah untuk menjadi fasilitator dari pembangunan manusia adalah melalui kebijaksanaan pengeluaran pemerintah. Salah satu hal yang paling menentukan dalam suksesnya pembangunan manusia adalah pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan sektor kesehatan, sehingga dua sektor tersebut menjadi prioritas bagi pemerintah untuk mewujudkan pembangunan manusia yang pada akhirnya menjadi input dalam proses pembangunan di berbagai sektor. UNDP memperkenalkan sebuah gagasan baru dalam pengukuran pembangunan manusia yang disebut sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Mongan, 2019). Sejak saat itu, IPM dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report (HDR)*. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup: umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*); pengetahuan (*knowledge*); dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. IPM harus dilihat sebagai penyederhanaan dari realitas yang kompleks dari luasnya dimensi

pembangunan manusia, karena hanya mencakup tiga dimensi dasar kualitas hidup manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi salah satu indikator yang penting dalam melihat sisi lain dari pembangunan. IPM memiliki manfaat penting antara lain menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun.

Seperti yang dikutip oleh organisasi pengembangan manusia, beberapa premis terpenting dari pembangunan manusia yakni: 1. Pembangunan mesti menempatkan manusia selaku fokus utama. 2. Pembangunan bertujuan guna menunjang pilihan masyarakat, bukan sekedar memberi peningkatan terhadap penghasilan. Karenanya konsepsi pembangunan manusia perlu dipusatkan terhadap populasi, tidak semata-mata perekonomian. 3. Pembangunan manusia tidak semata-mata menitikberatkan terhadap usaha meningkatkan kapasitas manusia, Namun pula menitikberatkan terhadap usaha memanfaatkan kapasitas manusia itu sendiri secara optimal Pembangunan manusia didasarkan pada empat pilar utama, yakni produktivitas, pemerataan, keberlanjutan serta pemberdayaan. 5. Pengembangan manusia ialah hal yang mendasari penetapan tujuan pembangunan serta penganalisaan pilihan guna menggapainya (Pramestry & Marseto, 2022). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yakni ukuran komparatif dari harapan hidup, harapan lama sekolah, pencapaian pendidikan serta standarisasi kehidupan bagi seluruh negara di dunia. IPM dipakai guna mengklasifikasi suatu negara sebagai negara maju dan berkembang ataupun kurang berkembang serta menjadi tolak ukur dari dampak kebijakan perekonomian pada mutu hidup.

Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah sering juga disebut pengeluaran publik, karena merupakan pengeluaran untuk membiayai program pemerintah dalam menjalankan pelayanan publik. (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, 2012), memberikan definisi pelayanan publik sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam peraturan pemerintah tersebut juga menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia memberikan tiga jenis pelayanan publik kepada masyarakat yaitu pelayanan barang publik, pelayanan jasa publik, dan pelayanan administratif. Pengeluaran pemerintah merupakan kombinasi produk yang dihasilkan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat, baik berupa pengadaan dan pemeliharaan barang publik, biaya pelaksanaan jasa publik, dan pelayanan administratif. Setiap aktivitas pemerintah yang tercermin dari pengeluaran pemerintah sebaiknya memiliki dampak positif dalam pembangunan daerah dan negara, pembangunan perekonomian, dan pembangunan manusia. Pelayanan dasar yang mencakup di dalamnya pelayanan publik seperti layanan di bidang pendidikan dan bidang kesehatan akan mempunyai pengaruh pada pembangunan manusia.

Dua dekade terakhir, Indonesia melakukan banyak reformasi bidang pendidikan. Ini dilakukan untuk mempersiapkan SDM Indonesia agar dapat bersaing di kancah internasional. Untuk itu, sejak tahun 2009, pemerintah telah

mengalokasikan 20 persen dari APBN untuk anggaran pendidikan (*mandatory spending*). Alokasi tersebut, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan belanja publik untuk pendidikan terbesar di Asia. Meskipun, jika dilihat dari persentase GDP, belanja pendidikan Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan Vietnam, Malaysia, bahkan Timor Leste. Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan merupakan pengeluaran pemerintah yang sangat mendasar dalam pembangunan manusia. Pendidikan merupakan bagian penting dalam pencapaian kapabilitas manusia, yang juga bersifat esensial bagi kehidupan masyarakat. Pendidikan mempunyai peranan penting dalam rangka meningkatkan kemampuan suatu negara dalam menyerap teknologi modern, khususnya negara berkembang seperti Indonesia. Selain itu, pendidikan juga memainkan peranan penting dalam mengembangkan kapasitas dalam rangka mewujudkan pertumbuhan dan pembangunan yang *berkesinambungan (sustainable growth)*. Pendidikan merupakan investasi yang akan selalu berdampak pada waktu yang akan datang. Pendidikan menjadi modal dasar dalam pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan bangsa. Pemerintah harus menyediakan alokasi belanja pada sektor pendidikan yang akan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan serta melakukan investasi dalam membentuk modal manusia (*human capital*). Modal manusia merupakan investasi produktif terhadap orang-orang; mencakup pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan gagasan (Todaro, M. P., & Smith, 2011). Semakin tinggi rata-rata tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, maka semakin mudah bagi setiap individu dalam usia bekerja untuk mengerti, menerapkan dan mendapatkan hasil dari kemajuan teknologi dan akhirnya meningkatkan standar ekonomi dan hidup bangsa (Diba et al., 2018). Penelitian terdahulu yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa belanja pemerintah bidang pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan IPM (Amrullah, 2022; Ardiningrum et al., 2021). Berdasarkan kajian tersebut, maka hipotesis (H_1) dalam penelitian ini adalah diduga terdapat pengaruh positif dan signifikan anggaran Pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia tahun 2015-2019.

Dalam konteks pembangunan ekonomi, kesehatan dan pendidikan mempunyai kaitan yang erat. Hal ini dapat digambarkan sebagaimana modal kesehatan yang semakin besar dapat meningkatkan pengembalian atas investasi di sektor pendidikan (Todaro, M. P., & Smith, 2011). Tingginya produktivitas para pekerja yang lebih sehat memungkinkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan dengan upah yang lebih baik (Todaro, M. P., & Smith, 2011). Pemerintah berkomitmen untuk memenuhi alokasi anggaran kesehatan sebesar 5% dari belanja negara, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Anggaran kesehatan tahun 2019 diarahkan untuk: (1) percepatan peningkatan kepesertaan; (2) peningkatan akses dan kualitas layanan program JKN; (3) mendorong supply side melalui sinkronisasi pemerintah pusat dan daerah; (4) mendorong pola hidup sehat melalui Germas; (5) peningkatan nutrisi ibu hamil, menyusui dan balita, serta imunisasi; (6) percepatan penurunan stunting melalui skema Program for Result (P for R); dan (7) pemerataan akses layanan kesehatan melalui DAK Fisik dan pembangunan rumah sakit di daerah menggunakan skema KPBU. Dengan kemudahan masyarakat mendapat akses

terhadap layanan kesehatan, maka kebutuhan dasar masyarakat akan kesehatan dapat dipenuhi sehingga kualitas kehidupan masyarakat menjadi meningkat. Dengan mengoptimalkan pengeluaran pemerintah, dalam hal ini khususnya pengeluaran untuk kepentingan kesehatan, maka kualitas kesehatan yang lebih baik dapat dihasilkan sehingga produktivitas yang tinggi akan lebih mudah dicapai (Jean Sanny Mongan, 2019). Penelitian terdahulu yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa belanja pemerintah bidang kesehatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan (Ardiningrum et al., 2021; Diba et al., 2018; Ernita, 2022; Halim et al., 2022) Maka hipotesis (H₂) dalam penelitian ini adalah diduga terdapat pengaruh positif dan signifikan anggaran Kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia tahun 2015-2019.

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa belanja pemerintah bidang pendidikan dan bidang kesehatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan IPM (Ardiningrum et al., 2021; Astri, M., Nikensari, S. I., & Kuncara, 2013; Ernita, 2022; Fattah, S., & Muji, 2012; Gupta, S., Clements, B., & Tjongson, 1998; Halim et al., 2022; Iheoma, 2014; M. J Razmi, 2012; Setyowati, L., & Suparwati, 2012) terdapat pengaruh positif dan signifikan anggaran pendidikan dan anggaran Kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia tahun 2015-2019.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di seluruh provinsi yang berada di Indonesia dengan mengambil sampel (*cross section*) pada 34 provinsi dan tahun (*time series*) sebanyak 5 seri/tahun (2015-2019). Metode analisis yang digunakan adalah uji korelasi dan model regresi linear ganda. Jenis penelitian bersifat kuantitatif data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistika (BPS, 2022) dan neraca pendidikan daerah (Kemendikbud, 2021). Data kuantitatif digunakan karena peristiwa pengeluaran pemerintah dan pembangunan manusia dijelaskan dengan angka-angka yang nantinya akan diolah menggunakan aplikasi pengolahan data SPSS. Model penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah model regresi linear ganda, berikut adalah model yang digunakan: $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2$. Dimana Y sebagai variabel dependen yang merupakan Indeks Pembangunan Manusia, α sebagai Constanta, X_1 sebagai variabel independen yang merupakan Pengeluaran Pemerintah Daerah Menurut Fungsi Pendidikan, X_2 sebagai variabel independen yang merupakan Pengeluaran Pemerintah Daerah Menurut Fungsi Kesehatan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tabel 1.
Ringkasan Analisis Regresi Linear Ganda

	R	KD	Sig.	F _{hitung}	Sig. t	t _{hitung}	Persamaan Regresi
X ₁	0,442	19,5%	0,000	20,255	0,000	5,279	Y= 63,753+0,269X ₁ +0,116 X ₂
X ₂					0,031	2,179	

Sumber: Diolah Peneliti, 2022

Berdasarkan tabel 1 diketahui nilai korelasi sebesar 0,442 hal ini menunjukkan terdapat hubungan Anggaran Pendidikan dan Anggaran Kesehatan dengan IPM. Besarnya angka korelasi menunjukkan bahwa hubungan antar variable berada pada kategori cukup kuat. Dari tabel di atas juga terlihat nilai Koefisien Determinasi Anggaran pendidikan dan kesehatan dengan IPM sebesar 19,5%, artinya kontribusi variabel Pendidikan dan kesehatan memberikan sumbangsih kepada IPM sebesar 19,5% sedangkan sisanya yaitu sebesar 80,5% IPM disumbang oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Untuk persamaan regresi diketahui $Y = 63,753 + 0,269 X_1 + 0,116 X_2$ dari persamaan ini diartikan jika ada peningkatan 1 point Anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan maka juga akan terjadi peningkatan IPM. Sedangkan untuk nilai uji signifikansi secara simultan diketahui nilai sig. (F) 0,000 hal ini menunjukkan bahwa nilai $0,000 < 0,05$ atau $F_{hitung} (20,255) > F_{tabel} (3,09)$ yang artinya terdapat pengaruh pendidikan dan kesehatan secara simultan terhadap IPM.

Sedangkan untuk uji lanjut variabel X_1 secara partial diketahui nilai sig. (t) 0,000 hal ini menunjukkan bahwa nilai $0,000 < 0,05$ atau $t_{hitung} (5,279) > t_{tabel} (1,645)$ yang artinya terdapat pengaruh Pendidikan secara partial terhadap IPM.

Sedangkan untuk uji lanjut variabel X_2 secara partial diketahui nilai sig. (t) 0,031 hal ini menunjukkan bahwa nilai $0,031 < 0,05$ atau $t_{hitung} (2,179) > t_{tabel} (1,645)$ yang artinya terdapat pengaruh kesehatan secara partial terhadap hasil IPM.

Hasil analisis menunjukkan adanya: Hasil analisis menunjukkan adanya: (1) pengaruh positif dan signifikan variabel pendidikan (X_1) dan kesehatan (X_2) secara simultan terhadap IPM (Y), (2) pengaruh positif dan signifikan variabel pendidikan (X_1) secara partial terhadap IPM (Y), dan (3) pengaruh positif dan signifikan variabel kesehatan (X_2) secara partial terhadap IPM.

Pembahasan

Pengaruh Anggaran Pendidikan dan Anggaran Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Pendidikan dan kesehatan secara bersama-sama memiliki pengaruh pada indeks pembangunan manusia. Hal tersebut berarti bahwa pengeluaran pemerintah dibidang Pendidikan dan kesehatan tidak bisa berdiri sendiri dan harus secara bersama-sama. Hal ini senada dengan penelitian (Ardiningrum et al., 2021; Astri, M., Nikensari, S. I., & Kuncara, 2013; Ernita, 2022; Fattah, S., & Muji, 2012; Gupta, S., Clements, B., & Tjongson, 1998; Halim et al., 2022; Iheoma, 2014; M. J Razmi, 2012; Setyowati, L., & Suparwati, 2012).

Pengaruh Anggaran Pendidikan Terhadap IPM

Anggaran Pendidikan terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Ini membuktikan bahwa alokasi anggaran pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat, dimana setiap terjadi perubahan pada pengeluaran pendidikan maka akan diikuti oleh perubahan IPM. Semakin tinggi rata-rata tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, maka semakin mudah bagi setiap individu dalam usia bekerja untuk

mengerti, menerapkan dan mendapatkan hasil dari kemajuan teknologi dan akhirnya meningkatkan standar ekonomi dan hidup bangsa. Hal ini diperkuat oleh (Amrullah, 2022; Ardiningrum et al., 2021; Demi Putri, 2019).

Hasil penelitian tersebut bertentangan dengan Jean Sanny Mongan (2019) yang menyatakan bahwa persentase belanja pemerintah pusat bidang Pendidikan dari PDRB tidak berpengaruh secara signifikan terhadap IPM di Indonesia. Hal ini menunjukkan investasi di bidang pendidikan masih harus mendapat perhatian untuk mendapatkan pendanaan dari pemerintah khususnya dari alokasi belanja pemerintah pusat.

Pengaruh Anggaran Kesehatan Terhadap IPM

Anggaran Kesehatan terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Investasi yang tepat di bidang kesehatan akan memberikan dampak positif terhadap pembangunan manusia. Penggunaan alokasi untuk pembangunan gedung kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas, serta pengadaan obat dan alat-alat kesehatan dapat meningkatkan kualitas kesehatan yang dimiliki oleh masyarakat. Peningkatan kepedulian masyarakat tentang cara hidup sehat juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan taraf kesehatan masyarakat. Senada dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ardiningrum et al., 2021; Ernita, 2022; Halim et al., 2022; Jean Sanny Mongan, 2019; M. Javad Razmi, 2012). Investasi bidang kesehatan masih harus mendapat perhatian khususnya dari alokasi belanja pemerintah daerah. Alokasi belanja sebaiknya bertumpu pada belanja yang bersifat preventif darai pada belanja kuratif.

E. SIMPULAN

Pengeluaran pemerintah pada bidang Pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, dimana jika terjadi perubahan pada anggaran Pendidikan maka akan meningkatkan indeks pembangunan manusia di Indonesia. Anggaran pada bidang Kesehatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, dimana setiap terjadi perubahan pada anggaran kesehatan maka, akan meningkatkan indeks pembangunan manusia di Indonesia. Anggaran pada bidang Pendidikan dan kesehatan secara bersama-sama memiliki pengaruh pada indeks pembangunan manusia. Hal tersebut berarti bahwa pengeluaran pemerintah dibidang Pendidikan dan kesehatan tidak bisa berdiri sendiri dan harus secara bersama-sama

DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, R. (2022). Analisis Pengaruh PDRB Perkapita, Anggaran Sektor Kesehatan, Sektor Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Se-Kabupaten Di Pulau Madura. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, 6(1), 90–98.
- Ardiningrum, L. R., Junaidi, J., & Umiyati, E. (2021). Pengaruh Indeks Ketahanan Pangan, Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada 10 provinsi di Pulau Sumatera. *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan*, 10(2), 59–68. <https://doi.org/10.22437/jels.v10i2.13402>
- Astri, M., Nikensari, S. I., & Kuncara, H. W. (2013). Pengaruh pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1).
- BPS. (2022). *Berita Resmi Statistik (BRS) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada tahun 2022*. BPS.
- Demi Putri, S. (2019). Pengaruh Ketenagakerjaan, Pengeluaran Pemerintah Dan Infrastruktur Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(3), 739–750.
- Diba, S. P. S., Kawung, G. M. V, & Luntungan, A. Y. (2018). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(4), 13–22.
- Ernita, D. (2022). PENGARUH ALOKASI ANGGARAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN KERINCI. *Jurnal AKRAB JUARA*, 7(2), 258–270.
- Fattah, S., & Muji, A. (2012). Local government expenditure allocation toward human development index at Jeneponto Regency, South Sulawesi, Indonesia. *Journal of Humanities and Social Science*, 5(6), 40-50.
- Gupta, S., Clements, B., & Tjongson, E. (1998). Public spending on human development. *Finance & Development*, 35(3).
- Halim, A., Rahayu, D., & Muzdalifah. (2022). ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (STUDI KASUS KAB/KOTA DAN 34 PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2015-2019). *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(8).
- Iheoma, C. G. (2014). Impact of social spending on human development in Sub-Saharan Africa. *American Journal of Social Sciences*, 2(2), 29–35.
- Jean Sanny Mongan, J. (2019). PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI INDONESIA. *Indonesian Treasury Review*, 4(2), 163–176.

- Kemendikbud. (2021). *Neraca Pendidikan Daerah*. Neraca Pendidikan Daerah (NPD). <https://npd.kemdikbud.go.id/>
- Mongan, J. J. S. (2019). PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI INDONESIA. *Indonesian Treasury Review*, 4(2), 163–176. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1083904&val=13961&title=Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1083904&val=13961&title=Pengaruh%20pengeluaran%20pemerintah%20bidang%20pendidikan%20dan%20kesehatan%20terhadap%20indeks%20pembangunan%20manusia%20di%20Indonesia)
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Pub. L. No. 96, Database Peraturan 1 (2012). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5311/pp-no-96-tahun-2012#abstrak>
- Pramestry, D., & Marseto. (2022). ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH PADA SEKTOR KESEHATAN DAN PENDIDIKAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN JOMBANG. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 8(1).
- Razmi, M. J. (2012). Investigating the effect of government health expenditure on HDI in Iran. *Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology*, 5.
- Razmi, M. Javad. (2012). Investigating the Effect of Government Health Expenditure on HDI in Iran. *Scientific Papers Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology*, 2(5), 1-13.
- Setyowati, L., & Suparwati, Y. K. (2012). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, DAU, DAK, PAD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan pengalokasian anggaran belanja modal sebagai variabel intervening. *Prestasi*, 9(1).
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Pembangunan ekonomi (Edisi Kesebelas ed.)*. Erlangga.